



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



(RENJA)
RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA :
- : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

☎ Telepon : 0512-2425788 ✉ e-mail : sekretariat@bpkad.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.5.4/10/BPKAD/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
 - bahwa untuk melegalkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA BADAN,



MUHAMMAD DARMIN

Jabatan	Paraf
Plt. Sekretaris	
Kasubbag. Perencanaan	

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke satu, maka disusunlah Renja Perubahan SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan untuk Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan -SKPD. Dimana RKA Perubahan -SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 10 Juni 2025

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
(Pembina Utama Muda / IV.c)
NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	7
A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD TA 2025.	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD	34
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.	38
D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.	47
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
A. Tujuan	48
B. Sasaran	49
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
A. Program	51
B. Kegiatan	52
C. Sub Kegiatan	53
BAB V : PENUTUP	99



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

☎ Telepon : 0512-2425788 ✉ e-mail : sekretariat@bpkad.tanahlautkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 10 Juni 2025

**KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**


MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
(Pembina Utama Muda / IV.c)
NIP. 19661227 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun

menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2025 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025. Berdasarkan Renja Perubahan SKPD BPKAD inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

Maksud disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah

yang jelas berupa program dan kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025.

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran strategis SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD sehingga terdapat keselarasan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi atas pelaksanaan RKPD tahun 2025 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD TA 2025 yang terdiri dari 3 Program 12 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut
Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPA Pergeseran Efisiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/M asalah
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.759.339.108,00	11.169.422.719,00		27,31%	2.285.438.683,00	20,46	8.883.984.036,00	

5.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	13	dokumen	13.991.158,00	13.927.904,00	dokumen, Laporan	60,00%	0,00	-	13.927.904,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	dokumen	8.993.175,00	8.930.693,00	dokumen	60,00%	0,00	-	8.930.693,00	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	laporan	4.997.983,00	4.997.211,00	3 Laporan	60,00%	0,00	-	4.997.211,00	
5.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	350 dok, 45 org/12 bln		8.827.656.332,00	8.826.256.332,00	Bulan, Dokumen	30,01%	1.962.496.311,00	22,23	6.863.760.021,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	45 Org/12	bulan	8.820.656.465,00	8.820.656.465,00	45 . 2 orang bulan	30,00%	1.960.360.811,00	22,22	6.860.295.654,00	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	350	dokumen	6.999.867,00	5.599.867,00	80 dokumen	40,00%	2.135.500,00	38,13	3.464.367,00	
5.02.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* (%)	3	paket	47.462.500,00	5.000.000,00	- Paket Orang	0,00%	0,00		5.000.000,00	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	paket	37.462.500,00	0,00	paket		0,00	-	-	

5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2 Orang	10.000.000,00	5.000.000,00	Orang		0,00	-	5.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	3 dok,14 paket, 200 laporan	1.339.497.602,00	793.506.967,00	Paket, Lap, Dokumen	22,38%	147.997.235,00	18,65	645.509.732,00	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1 paket	9.984.679,00	9.984.679,00	paket		0,00	-	9.984.679,00	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	8 paket	130.499.274,00	112.405.496,00	4 paket	50,00%	61.993.000,00	55,15	50.412.496,00	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	9.992.657,00	9.992.657,00	paket	60,00%	4.757.000,00	47,60	5.235.657,00	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	2 paket	49.999.792,00	39.977.935,00	2 paket	20,00%	3.908.800,00	9,78	36.069.135,00	
5.02.01.2.06.07	Jumlah Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.000.000,00	12.000.000,00	Bahan	30,00%	0,00	-	12.000.000,00	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.070.250.000,00	555.375.000,00	77 laporan	20,00%	77.338.435,00	13,93	478.036.565,00	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	28.771.200,00	28.771.200,00	Dokumen		0,00	-	28.771.200,00	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	Dokumen		0,00	-	25.000.000,00	

5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24 unit	546.275.900,00	546.275.900,00	- Unit	0,00%	0,00	-	546.275.900,00	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	Unit		0,00	-	50.000.000,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	99.922.200,00	99.922.200,00	Unit		0,00	-	99.922.200,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	146.353.700,00	146.353.700,00	Unit		0,00	-	146.353.700,00	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	Unit		0,00	-	250.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	15 laporan	849.921.716,00	849.921.716,00	4 Laporan	25,00%	144.926.437,00	17,05	704.995.279,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	2 laporan	25,00%	47.353.870,00	13,53	302.646.130,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 laporan	499.921.716,00	499.921.716,00	2 laporan	25,00%	97.572.567,00	19,52	402.349.149,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)	39 unit	134.533.900,00	134.533.900,00	Unit	31,45%	30.018.700,00	22,31	104.515.200,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	20.000.000,00	20.000.000,00	1 unit	15,00%	2.655.000,00	13,28	17.345.000,00	

5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	64.608.000,00	64.608.000,00	5 unit	33,00%	10.713.700,00	16,58	53.894.300,00	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 unit	24.925.900,00	24.925.900,00	5 unit	22,00%	4.875.000,00	19,56	20.050.900,00	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	25.000.000,00		50,00%	11.775.000,00	47,10	13.225.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		285 dok, 21 lap, 120 org	396.254.446.165,00	373.760.467.697,00	Dokumen	33,07%	121.379.341.890,00	32,48	252.381.125.807,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)	174 dok	498.458.313,00	388.640.848,00	Dokmen	11,34%	9.625.000,00	2,48	379.015.848,00	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	43.933.562,00	35.550.069,00	dokumen		0,00	-	35.550.069,00	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2 dokumen	43.678.858,00	34.239.689,00	dokumen		0,00	-	34.239.689,00	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	16.301.779,00	14.403.422,00	dokumen		0,00	-	14.403.422,00	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	16.320.405,00	16.301.862,00	dokumen		0,00	-	16.301.862,00	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	4.136.885,00	709.914,00	dokumen		0,00	-	709.914,00	

5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	4.235.743,00	782.688,00	dokumen		0,00	-	782.688,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	179.730.163,00	128.322.702,00	dokumen	20,00%	7.000.000,00	5,45	121.322.702,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	158.964.406,00	133.185.391,00	1 dokumen	10,00%	750.000,00	0,56	132.435.391,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	dokumen	31.156.512,00	25.145.111,00	dokumen	15,00%	1.875.000,00	7,46	23.270.111,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah			156.027.321,00	139.418.971,00	Dokmen, Orang	31,11%	22.900.000,00	16,43	116.518.971,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84	dokumen	14.797.621,00	13.670.769,00	42 dokumen	50,00%	0,00	-	13.670.769,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	dokumen	56.308.402,00	44.978.904,00	dokumen	50,00%	21.550.000,00	47,91	23.428.904,00

5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	dokumen	19.928.218,00	15.776.218,00	dokumen	25,00%	0,00	-	15.776.218,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	dokumen	9.999.829,00	9.999.829,00	Orang	25,00%	0,00	-	9.999.829,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120	orang	54.993.251,00	54.993.251,00	Orang	10,00%	1.350.000,00	2,45	53.643.251,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 lap, 22 dok, 120 org		985.150.644,00	802.139.755,00	Dokmen, Laporan, Orang	26,76%	105.795.850,00	13,19	696.343.905,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7	laporan	119.997.162,00	101.268.464,00	1 dokumen	30,00%	29.075.220,00	28,71	72.193.244,00

5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	dokumen	85.424.236,00	61.811.913,00	laporan	30,00%	16.896.900,00	27,34	44.915.013,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	8	laporan	192.679.691,00	141.398.581,00	laporan	25,00%	24.237.000,00	17,14	117.161.581,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	6	laporan	294.798.856,00	280.910.874,00	dokumen	33,00%	18.849.930,00	6,71	262.060.944,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	dokumen	189.999.606,00	139.981.579,00	dokumen	15,00%	8.163.800,00	5,83	131.817.779,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	dokumen	34.996.370,00	28.383.646,00	2 dokumen	32,00%	8.573.000,00	30,20	19.810.646,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120	Orang	67.254.723,00	48.384.698,00	Orang	25,00%	0,00	-	48.384.698,00

5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	131 laporan	394.614.809.887,00	372.430.268.123,00	-	33,11%	121.241.021.040,00	32,55	251.189.247.083,00	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	290.376.263.769,00	290.376.263.769,00	Laporan	45,00%	121.241.021.040,00	41,75	169.135.242.729,00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	104.238.546.118,00	82.054.004.354,00	Laporan		0,00	-	82.054.004.354,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		26 lap, 60 dok, 80 org	8.810.565.478,00	8.239.861.481,00	Dokumen, Laporan, Orang	46,76%	5.275.586.481,00	64,03	2.964.275.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	26 lap, 60 dok, 80 org	8.810.565.478,00	8.239.861.481,00	dokumen	46,76%	5.275.586.481,00	64,03	2.964.275.000,00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	229.995.308,00	213.010.527,00	dokumen	50,00%	8.010.000,00	3,76	205.000.527,00	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 dokumen	5.506.883.190,00	5.372.048.864,00	dokumen	50,00%	4.408.103.581,00	82,06	963.945.283,00	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	44.999.462,00	31.919.222,00	Laporan	100,00%	0,00	-	31.919.222,00	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	614.999.052,00	605.504.298,00	Laporan	25,00%	44.973.500,00	7,43	560.530.798,00	

5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	52.589.600,00	25.939.680,00	Laporan	25,00%	0,00	-	25.939.680,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Laporan	902.110.024,00	782.016.827,00	Laporan	25,00%	52.120.900,00	6,66	729.895.927,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	198.790.991,00	45.112.746,00	Laporan	10,00%	0,00	-	45.112.746,00
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	1.090.699.335,00	1.041.217.460,00	dokumen	70,00%	753.183.500,00	72,34	288.033.960,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	8	dokumen	81.499.596,00	59.249.411,00	Laporan	10,00%	1.995.000,00	3,37	57.254.411,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8	Laporan	24.999.651,00	20.089.374,00	Orang	25,00%	7.200.000,00	35,84	12.889.374,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80	orang	62.999.269,00	43.753.072,00	Orang	25,00%	0,00	-	43.753.072,00
	JUMLAH				416.824.350.751,00	393.169.751.897		35%	128.940.367.054	32,80	264.229.384.843,00

Evaluasi atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD BPKAD Tahun 2025, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 416.824.350.751,- telah terealisasi sebesar Rp 128.940.367.054,- atau sebesar 32,80%. Adapun Evaluasi RENJA SKPD BPKAD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sesuai pada Aplikasi E-Monev baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat disajikan sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sa sar an	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKP D Penanggungjawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Semua Bidang																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			85.230.276.358		-		11.169.422.719		2.285.438.683		-		-		-		2.285.438.683		20,46%		2.285.438.683		2,68%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		107.175.051	0,00	-	100	13.927.904	-	-		-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()		52.237.558	0,00	-	7	8.930.693	-	-								-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	54.937.493	0,00	-	6	4.997.211	3	-							3	-	50,00%	0,00%	3,00	-	50,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	64.813.611.534	0,00	-	100	8.826.256.332	-	1.962.496.311	-	-	-	-	1.962.496.311	0,00%	22,23%	0,00	1.962.496.311	0,00%	6,08%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	64.743.611.534	0,00	-	45	8.820.656.465	45	1.960.360.811					45	1.960.360.811	100,00%	22,22%	45,00	1.960.360.811	0,00%	3,03%					Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	350,00	70.000.000	0,00	-	350	5.599.867	80	2.135.500				80	2.135.500	22,86%	38,13%	80,00	2.135.500	22,86%	3,05%					Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	488.950.000	0,00	-	100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55,00	294.950.000	0,00	-	1	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10,00	194.000.000	0,00	-	2	5.000.000	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					Tidak Ada

			Perundang-Undangan (Orang)																					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	10.151.705.041	0,00	-	100	793.506.967	-	147.997.235	-	-	-	-	147.997.235	0,00%	18,65%	0,00	147.997.235	0,00%	13,67%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	91.189.174	0,00	-	1	9.984.679	-	-					0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	799.169.836	0,00	-	8	112.405.496	4	61.993.000				4	61.993.000	50,00%	55,15%	4,00	61.993.000	80,00%	7,76%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	128.687.538	0,00	-	1	9.992.657	-	4.757.000				-	4.757.000	0,00%	47,60%	0,00	4.757.000	0,00%	3,70%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2,00	341.508.493	0,00	-	2	39.977.935	2	3.908.800				2	3.908.800	100,00%	9,78%	2,00	3.908.800	100,00%	1,14%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2,00	75.000.000	0,00	-	2	12.000.000	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1)		947.463.000	0,00	-	100	134.533.900	-	30.018.700	-	-	-	-	30.018.700	0,00%	22,31%	0,00	30.018.700	0,00%	13,96%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	138.200.000	0,00	-	1	20.000.000	1	2.655.000				1	2.655.000	100,00%	13,28%	1,00	2.655.000	100,00%	1,92%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20,00	412.908.000	0,00	-	15	64.608.000	5	10.713.700				5	10.713.700	33,33%	16,58%	5,00	10.713.700	25,00%	2,59%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50,00	236.855.000	0,00	-	22	24.925.900	5	4.875.000				5	4.875.000	22,73%	19,56%	5,00	4.875.000	10,00%	2,06%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2,00	159.500.000	0,00	-	1	25.000.000	-	11.775.000				-	11.775.000	0,00%	47,10%	0,00	11.775.000	0,00%	7,38%		Tidak Ada
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	84,29%	20,46%						

		Predikat Kinerja																				Tinggi	Sangat Rendah					
KEUANGAN																												
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			1.525.470.703.50 ₁		-		373.760.467.697		121.379.341.8 ₉₀									121.379.341.8 ₉₀		32,48%		121.379.341.8 ₉₀		7,96%	Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persen)		3.259.693.960	0,00	-	100	388.640.848	-	9.625.000									9.625.000	0,00%	2,48%	0,00	9.625.000	0,00%	2,04%			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	319.110.750	0,00	-	2	35.550.069	-	-									-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	314.956.700	0,00	-	2	34.239.689	-	-									-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	94.767.150	0,00	-	40	14.403.422	-	-									-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	93.356.500	0,00	-	40	16.301.862	-	-									-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	40,00	28.398.080	0,00	-	40	709.914	-	-									-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		

		(Dokumen)																					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	28.398.080	0,00	-	40	782.688	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2,00	1.164.744.700	0,00	-	2	128.322.702	-	7.000.000	-	7.000.000	0,00%	5,45%	0,00	7.000.000	0,00%	0,60%				Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2,00	1.079.210.050	0,00	-	2	133.185.391	1	750.000	1	750.000	50,00%	0,56%	1,00	750.000	50,00%	0,07%				Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5,00	136.751.950	0,00	-	6	25.145.111	2	1.875.000	2	1.875.000	33,33%	7,46%	2,00	1.875.000	40,00%	1,37%				Tidak Ada
		Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah (Persen)		1.217.006.447	0,00	-	100	139.418.971	-	22.900.000	-	22.900.000	0,00%	16,43%	0,00	22.900.000	0,00%	5,95%				

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	168,00	82.358.100	0,00	-	84	13.670.769	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1,00	380.979.514	0,00	-	1	44.978.904	-	21.550.000									0,00%	47,91%	0,00	21.550.000	0,00%	5,66%	Tidak Ada
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1,00	189.768.833	0,00	-	2	15.776.218	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan	2,00	98.900.000	0,00	-	2	9.999.829	-	-									0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada

			aan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan (Dokumen)																					
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausah aan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	82,00	465.000.000	0,00	-	120	54.993.251	-	1.350.000					-	1.350.000	0,00%	2,45%	0,00	1.350.000	0,00%	0,29%	Tidak Ada
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen)		6.529.510.585	0,00	-	100	802.139.755	-	105.795.850					-	105.795.850	0,00%	13,19%	0,00	105.795.850	0,00%	12,65%	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaa n Akuntansi Penerimaan dan Pengeluara n Kas Daerah (Laporan)	12,00	521.058.652	0,00	-	7	101.268.464	2	29.075.220					2	29.075.220	28,57%	28,71%	2,00	29.075.220	16,67%	5,58%	Tidak Ada

		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)		1.514.464.492.509	0,00	-	100	372.430.268.123	-	121.241.021.040	-	-	-	-	-	121.241.021.040	0,00%	32,55%	0,00	121.241.021.040	0,00%	8,81%		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	130,00	1.376.464.492.509	0,00	-	130	290.376.263.769	-	121.241.021.040	-	-	-	-	-	121.241.021.040	0,00%	41,75%	0,00	121.241.021.040	0,00%	8,81%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1,00	138.000.000.000	0,00	-	1	82.054.004.354	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,05%	32,48%				
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			32.270.129.547		-		8.239.861.481		5.275.586.481		-	-	-	-	5.275.586.481		64,03%		5.275.586.481		16,35%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)		32.270.129.547	0,00	-	100	8.239.861.481	-	5.275.586.481	-	-	-	-	-	5.275.586.481	0,00%	64,03%	0,00	5.275.586.481	0,00%	60,99%		
		Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang	1,00	593.995.307	0,00	-	2	213.010.527	-	8.010.000	-	-	-	-	-	8.010.000	0,00%	3,76%	0,00	8.010.000	0,00%	1,35%		Tidak Ada

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, BPKAD juga menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan anggaran SKPD, selain juga tugas-tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan PPKD, seperti penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RAPBD sampai menjadi DPA dan selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPKAD juga selain menangani kekayaan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya selaku SKPD juga melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah untuk disajikan dalam laporan neraca daerah.

Secara garis besar pelayanan SKPD BPKAD terhadap penyelenggaraan baik dalam pengelolaan proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian kinerja indikator sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis Nomor 1 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dengan indikator Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%, dan pada Tahun 2023 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk yang ke 11 (sebelas) kalinya, sehingga dengan demikian bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam tahun Renstra BPKAD 2013-2018, tahun Renstra 2018-2023 dan Tahun Renstra 2024-2026, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mendukung sasaran IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tanggungjawab Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

- b. Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah dengan indikator Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD telah mendapatkan nilai sebesar 100% yaitu dengan penjelasan bahwa Kas daerah dapat dipenuhi sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah diterbitkan oleh BPKAD, sehingga dapat diyakini bahwa surat penyediaan dana yang terbit dipastikan dapat dipenuhi dengan Kas daerah yang tersedia dan dapat dipastikan belanja daerah terbayar pada tahun anggaran bersangkutan.
- c. Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan dengan indikator Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan capaian kinerjanya melebihi mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 138,82%, yaitu dengan penjelasan bahwa penganggaran lebih besar dari pada perencanaan, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya tambahan DBH Sawit dan setelah adanya TKDD ada peluang untuk menambah volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sehingga pada setiap tahun penganggaran tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan karena ditahapan perencanaan Pemerintah kabupaten Tanah Laut telah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas.
- d. Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD dengan indikator Nilai SAKIP BPKAD yang merupakan IKU Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 101,04 %, bahwa rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian SAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian SAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian SAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja

pada tahun 2021 adalah penilaian SAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Pada tahun 2022 adalah penilaian SAKIP Tahun 2021 sebesar 116,67% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,08%. Pada tahun 2023 adalah penilaian SAKIP Tahun 2022 sebesar 116,43% mengalami penurunan dari tahun 2022. Pada tahun 2024 adalah penilaian SAKIP Tahun 2023 sebesar 101,04% mengalami penurunan dari tahun 2023. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya yaitu berjumlah 4 Sasaran Strategis dengan 4 indikator sasaran dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022,2023 dan 2024 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara terinci dengan penjelasan berikut ini.

Persentase pengelolaan pelaporan keuangan SKPD Pemkab Tala berbasis Akrual, bahwa mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan tahun 2018 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan daerah diatur bahwa LPP APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat 31 Agustus 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Agustus.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, tentunya fokus yang menjadi perhatian penting dan menjadi isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD baik selaku SKPD maupun sebagai PPKD adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2025-2029 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat

menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun diharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

c. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya

diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga harus disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas dan kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.

- 2) Berkas pengajuan penerbitan SP2D ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 3) Rekening Penerima yang tercantum pada SPM sering ada kesalahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 4) Keterlambatan dalam menyampaikan kembali berkas yang diperbaiki.
- 5) Ada beberapa SKPD yang lambat menyampaikan berkas SP2D ke Bank Umum Daerah sehingga dana yang masuk ke penerima dana mengalami keterlambatan.
- 6) Berkas administrasi pendukung proposal pencairan dana tidak lengkap dan perlu diverifikasi ulang.
- 7) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 8) Penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.
- 9) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- 10) SKPD tidak melaporkan perubahan pemegang user simcloud dan kurangnya pengarsipan user simcloud sehingga SKPD berulang kali meminta password dan user simcloud.
- 11) Kegiatan cek pendapatan mengalami kendala dikarenakan SKPD telat menginput ke SIMDA, informasi transfer dana masuk ke kasda sering kurang jelas uraiannya, sehingga untuk dana transfer perlu waktu untuk mengidentifikasi masuk ke pendapatan SKPD yang sebenarnya, serta SKPD terlambat memberikan bukti STS pengembalian untuk tahun berjalan dan tahun yang telah lewat.
- 12) Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara

penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.

- 13) Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
- 14) Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD.

b. Solusi Mengatasi Masalah Keuangan Daerah

- 1) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 2) Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap PPK-SKPD terhadap Verifikasi SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- 4) Melakukan sosialisasi terhadap Bendahara Pengeluaran yang masih baru.
- 5) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 6) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kelengkapan berkas dan RAB yang tidak sesuai antara usulan dengan usulan pencairan.

- 7) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta dengan bidang akuntansi terkait Surat Edaran Bupati tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun.
- 8) Mengingatkan kepada SKPD agar dapat menginformasikan dengan segera saat terjadi perubahan pemegang SIMCLOUD dan untuk menyimpan dengan baik user dan password yang digunakan.
- 9) Berkoordinasi dengan subid akuntansi pendapatan dan piutang dan BAPENDA agar dapat menginformasikan kepada bendahara Penerimaan untuk sesegera mungkin melakukan input data pendapatan.
- 10) Melakukan rekonsiliasi kas BOS tiap semester dengan Dinas Pendidikan
- 11) Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.
- 12) Pemberian penghargaan kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sanksi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsif dan komunikatif.
- 13) Melakukan pendataan terhadap Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- 14) Melakukan diskusi dan koordinasi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- 15) Memberikan bantuan pendampingan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.
- 16) Melakukan koordiansi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,
- 17) Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 18) Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan asset,
- 19) Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

c. Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah

- 1) Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
- 2) Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
- 3) Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.
- 4) Anggaran yang terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 5) Adanya amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 yang mengisyaratkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga diperlukan perubahan terhadap SSH Tahun 2021. Karena data SSH awal yang telah siap adalah data untuk keperluan Aplikasi Simda Keuangan, sehingga mesti dilakukan perubahan dengan mengeluarkan unsur PPN dari Standar Satuan Harga Tahun 2021.
- 6) Kurangnya kesadaran pengurus barang dalam menyusun laporan-laporan aset.
- 7) Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin.
- 8) Pemerintah Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa sebanyak 2 kali permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Namun berdasarkan surat dari Kepala KPKNL Banjarmasin nomor S-1983/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan penilaian BMD 2020 disampaikan bahwa pihak KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan KPKNL Banjarmasin sedang melaksanakan penyelesaian reval BMN 2020 dengan target penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2020. Dan saat ini seluruh Penilai Pemerintah pada KPKNL Banjarmasin fokus penyelesaian perbaikan kualitas laporan penilaian kembali BMN. Oleh karena itu kegiatan penilaian barang milik daerah tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian 0%.

- 9) Direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pemberian materi secara langsung kepada peserta sosialisasi dengan sasaran Peserta yaitu aparat desa di 11 Kecamatan serta Pengguna Barang dan Pengurus barang di tingkat Kabupaten. Namun dengan adanya refocusing anggaran serta adanya pandemic Covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sosialisasi tetap dapat dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui penyerahan buku sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaannya.
- 10) Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.
- 11) Pandemi Covid 19 melanda Kabupaten Tanah Laut, akibatnya banyak anggaran dialihkan untuk Belanja Tak terduga , sehingga terjadi Refocusing Anggaran. Anggaran menjadi terbatas karena banyak direfocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 . Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD untuk Pencatatan Neraca Aset Daerah.
- 12) Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD
- 13) Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020 belum tersedianya dana untuk penilai publik sehingga kegiatan penilaian hanya dengan penilai pemerintah (KPKNL);
- 14) Kebijakan
Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing APBD dan adanya pandemi covid 19, sehingga anggaran untuk lelang BMD yang semula dianggarkan tidak bisa terealisasi, ketergantungan dengan KPKNL untuk penilaian BMD yang akan dilelang, perjalanan dinas dibatasi dan skala prioritas, sehingga serapan anggaran Subbid Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;

15) Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;

16) Ketergantungan dengan pihak lain

Pada kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

17) Belum Adanya Penilai Internal

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

d. Solusi Mengatasi Masalah Pengelolaan Aset Daerah

- 1) Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran
- 2) Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 3) Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 4) Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.
- 5) Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran.
- 6) Terus melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak SKPD khususnya pengurus barang dalam tertib administrasi dan pelaporan-pelaporan barang persediaan.
- 7) Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
- 8) Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut .
- 9) Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 10) Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
- 11) Pembentukan tim penilai pemanfaatan BMD tingkat Kabupaten.
- 12) Peningkatan pengawasan terhadap BMD yang dimanfaatkan dengan melibatkan Instansi terkait.
- 13) Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD
- 14) Mengusulkan kembali Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD agar BMD SKPD yang belum dinilai bisa dilakukan penilaian
- 15) Meningkatkan Kinerja SDM Pengurus Barang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah .
- 16) Pemberian penghargaan kepada pengurus barang SKPD terbaik yang mengelola barang milik daerah (BMD) SKPD.
- 17) Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.
- 18) Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
- 19) Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
- 20) Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;
- 21) Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.
- 22) Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 23) Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;
- 24) Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction);

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari 3 program dan 12 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 adalah program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kekayaan daerah. Usulan program dan kegiatan di luar dua bidang tersebut adalah sebagai pendukung untuk tiga bidang di atas yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tiga bidang utama tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

A. Tujuan

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2025-2029.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- a. Pengembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
- b. Pengembangan penyelenggaraan kekayaan daerah
- c. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan administrasi, sarana/prasarana dan sumberdaya aparatur.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan dan dengan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA Perubahan SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA Perubahan SKPD.

A. Program

Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD
 - b) Indikator : Sakip Perangkat Daerah, Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Perangkat Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu, Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pelaporan
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Administrasi Umum SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah
 - b) Indikator : Persentase Aset dalam Kondisi Baik
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

- b) Indikator : Persentase Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Sub Kegiatan

Adapun Sub Kegiatan – Sub Kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 58 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - a) Sasaran : Tersedianya Pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD 12 bulan
 - b) Indikator : Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)

4. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
 - b) Indikator : Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - a) Sasaran : Tersedianya paket pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b) Indikator : Jumlah Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Sasaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b) Indikator : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - a) Sasaran : Tersedianya paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Indikator : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a) Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - a) Sasaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
 - b) Indikator : Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - a) Sasaran : Tersedianya Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SKPD
 - b) Indikator : Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
11. Penyediaan Bahan/Material
 - a) Sasaran : Tersedianya Bahan/Material
 - b) Indikator : Jumlah Penyediaan Bahan / Material

12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b) Indikator : Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - a) Sasaran : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - a) Sasaran : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - a) Sasaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pengadaan Mebel
 - a) Sasaran : Tersedianya Mebel
 - b) Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a) Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - a) Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b) Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
19. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

- b) Indikator : Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - b) Indikator : Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- a) Sasaran : Tersedianya Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- a) Sasaran : Tersedianya Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- a) Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- a) Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b) Indikator : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS.
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPA yang disusun.
26. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun.
27. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
 - b) Indikator : Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi.
28. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi.
29. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - b) Indikator : Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi
30. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
 - b) Indikator : Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang di verifikasi.
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - b) Indikator : Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- b) Indikator : Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
33. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
34. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
35. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
36. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
37. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab Sub kegiatan
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

- b) Indikator : Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
38. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- a) Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
39. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
40. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
41. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
42. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)

43. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)
44. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
45. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- a) Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)
46. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan
47. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Dana Darurat dan Mendesak
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
48. Penyusunan Standar Harga

- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Standar Harga
 - b) Indikator : Jumlah Standar Harga yang Disusun
49. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
50. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
51. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah
52. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)
53. Pengamanan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
54. Penilaian Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah
55. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
56. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi

57. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- b) Indikator : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

58. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Sasaran : Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- b) Indikator : Jumlah Pengurus Barang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD

Dalam penyampaian Renja Perubahan BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya di proses masuk ke dalam RKPD Perubahan dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS Perubahan. KUA/PPAS Perubahan inilah nantinya setelah di sepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA Perubahan SKPD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di usulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 BPKAD dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan di capai adalah sebagaimana tabel berikut ini:

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77									4.820.232.946.154,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77									4.820.232.946.154,00		
	5	02				KEUANGAN				332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77									4.820.232.946.154,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat BPKAD				88 Nilai	88 Nilai	12.189.103.281,00	11.759.339.108,00	13.197.354.831,48							12.917.885.919,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.991.158,00	13.991.158,00	13.991.158,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		20.659.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	8.993.175,00	8.993.175,00	8.879.478,30	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			9.891.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	4.997.983,00	4.997.983,00	4.984.077,50	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.767.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.827.656.333,00	8.827.656.332,00	8.827.656.332,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		9.312.226.569,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

						Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjang an ASN			45 Orang/bulan	45 Orang/ bulan	8.820.656.466,00	8.820.656.465,00	10.105.768.374,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a Dana Aloka si Umu m (DAU) DAU Tamb ahan Duku ngan Penda naan atas Kebija kan Pengg ajian Pega wai Peme rintah denga n Perja njian Kerja	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik		9.297.226.569,0 0	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				350 Dokumen	350 Dokumen	6.999.867,00	6.999.867,00	5.599.867,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	47.462.500,00	47.462.500,00	47.462.500,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	37.462.500,00	37.462.500,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.06		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persenta se Capaian Administ rasi Umum Perangk at Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.769.247.602,00	1.339.497.602,00	1.339.497.602,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupat en Tanah Laut		1.835.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P enerangan Banguna n Kantor yang Disedi ak an				1 Paket	1 Paket	9.984.679,00	9.984.679,00	9.984.679,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			15.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disedi ak an				8 Paket	8 Paket	130.499.274,00	130.499.274,00	112.405.496,30	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			100.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disedi ak an				1 Paket	1 Paket	9.992.657,00	9.992.657,00	9.992.657,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			10.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.999.792,00	49.999.792,00	39.977.935,38	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			65.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	17.975.550,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			15.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Lapora n	1.500.000.000,00	1.070.250.000,00	955.375.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokum en	28.771.200,00	28.771.200,00	542.856.600,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			100.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																

						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	546.290.072,00	546.275.900,00	546.275.900,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	99.936.372,00	99.922.200,00	99.922.200,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			450.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	499.921.716,00	499.921.716,00	337.246.917,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			500.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	Persenta se Capaian Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	134.533.900,00	134.533.900,00	134.533.900,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupat en Tanah Laut		175.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipelihar				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	34.986.400,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			25.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH

2	5	02	02			PROGRA M PENGE LOAN KEUANG AN DAERAH	Persenta se Penyam paian Dokume n Laporan Keuanga n Pemerin tah Daerah yang tepat waktu				100 Persen	100 Persen	312.711.451.651,00	401.691.990.322,15	325.005.619.921,66						305.147.360.23 5,00		
	5	02	02	2.01		Koordina si dan Penyusu nan Rencana Anggara n Daerah	Persenta se Capaian Koordina si dan Penyusu nan Rencana Anggara n Daerah	-			100 Persen	100 Persen	498.458.313,00	498.458.313,00	498.458.313,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Pemerin tah Kabupat en Tanah Laut		641.031.185,00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokume n KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokum en	43.933.562,00	43.933.562,00	40.997.949,39	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			60.000.000,00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokume n Perubah an KUA dan Perubah an PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokum en	43.678.858,00	43.678.858,00	36.509.639,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			60.000.000,00	BADAN PENGELO L AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	

							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	16.301.779,00	16.301.779,00	14.403.422,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	16.320.405,00	16.320.405,00	16.301.862,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	4.136.885,00	4.136.885,00	709.914,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			5.787.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	4.235.743,00	4.235.743,00	782.688,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			5.787.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	

						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	179.730.163,00	179.730.163,00	172.322.702,35	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			227.878.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	158.964.406,00	158.964.406,00	173.935.390,80	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			215.401.550,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	5 Dokumen	31.156.512,00	31.156.512,00	25.145.111,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			32.175.975,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	159.687.321,00	156.027.321,00	156.027.321,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		243.329.050,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	

						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				84 Dokumen	84 Dokumen	14.797.621,00	14.797.621,00	13.670.768,80	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			15.929.050,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.968.402,00	56.308.402,00	44.978.904,40	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			75.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	19.928.218,00	19.928.218,00	15.776.218,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			38.500.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH

sasi Kas

5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
---	----	----	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.999.829,00	9.999.829,00	9.999.829,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny a	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			18.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--	---	---	--	--	--	---------------	--

5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
---	----	----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah				120 Orang	120 Orang	54.993.251,00	54.993.251,00	54.993.251,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny a	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	--	---	---	--	--	--	---------------	--

							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			6 Dokumen	6 Dokumen	189.999.606,00	189.999.606,00	178.482.720,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			235.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	34.999.782,00	34.996.370,25	28.383.303,22	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			116.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	69.999.723,00	67.254.723,00	52.649.444,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	311.253.310.631,00	400.052.354.043,95	400.052.354.043,95			-	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		303.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				130 Laporan	130 Laporan	286.253.310.631,00	290.376.263.769,00	299.854.392.561,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa	-	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			278.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000.000,00	109.676.090.274,95	23.633.286.689,39	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku			100 Persen	100 Persen	8.005.422.827,00	8.810.565.478,36	12.365.717.932,63								4.502.167.700.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		100 Persen	100 Persen	8.005.422.827,00	8.810.565.478,36	8.810.565.478,36			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut			4.502.167.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen	2 Dokumen	79.998.464,00	229.995.307,90	210.164.486,90	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	

						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	4.999.983.626,00	5.506.883.190,13	5.209.668.863,78	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			4.500.000.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																
						Jumlah Kebijaka n Pengelol aan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.999.462,00	44.999.462,00	31.919.222,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																
						Jumlah Laporan Penatau sahaan Barang Milik Daerah				16 Laporan	16 Lapora n	349.999.614,00	614.999.051,74	629.226.298,60	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			367.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Inventari sasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Lapora n	79.999.649,00	52.589.600,10	25.939.680,10	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			98.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																

						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	941.312.125,00	902.110.024,22	781.886.777,02	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			760.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	222.131.376,00	198.790.991,24	154.782.746,30	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			197.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	3 Laporan	1.108.999.335,00	1.090.699.335,00	5.112.434.550,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			325.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																

						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	89.999.858,00	81.499.595,74	70.852.959,77	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran Tahun Sebel umnya a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik		150.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			8 Laporan	8 Lapora n	24.999.651,00	24.999.651,00	20.089.374,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran Tahun Sebel umnya a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik		50.900.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
					Jumlah Orang yang Mengiku ti Pembina an Pengelol aan Barang Milik Daerah Pemerin tah Kabupat en/Kota			80 Orang	80 Orang	62.999.667,00	62.999.269,29	118.752.974,16	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran Tahun Sebel umnya a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik		85.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
										J U M L A H	332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77						4.820.232.946.154,00	

Dalam tabel di atas untuk RENJA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2025 terdapat 3 Program dan 12 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan total usulan anggaran kegiatan SKPD sebelum perubahan sebesar Rp. 332.905.977.759,00,- , setelah perubahan anggaran menjadi Rp 350.568.692.685,77,- bertambah sebesar Rp 17.662.714.926,77,- dengan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan masing-masing.

RANGKUMAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BERDASARKAN ALASAN ADANYA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB INDIKATOR	TARGET	PAGU SEMULA	PAGU PERUBAHAN	Bertambah/Berkurang	URGENSI (ALASAN PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.993.175,00	8.879.478,30	- 113.696,70	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4.997.983,00	4.984.077,50	- 13.905,50	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	8.820.656.465,00	10.105.768.374,00	1.285.111.909,00	Penyesuaian penambahan belanja Gaji/tunjangan bagi PPPK
				4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	6.999.867,00	5.599.867,00	- 1.400.000,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	37.462.500,00	-	- 37.462.500,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	10.000.000,00	5.000.000,00	- 5.000.000,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025

		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.984.679,00	9.984.679,00	-	Tidak ada perubahan	
				8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	130.499.274,00	112.405.496,30	18.093.777,70	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	9.992.657,00	9.992.657,00	-	-	Tidak ada perubahan
				10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.999.792,00	39.977.935,38	10.021.856,62	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				11	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	15.000.000,00	17.975.550,00	2.975.550,00	-	Penambahan belanja untuk mendukung Kegiatan Porprov di Kabupaten Tanah Laut
				12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.070.250.000,00	955.375.000,00	114.875.000,00	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	28.771.200,00	542.856.600,00	514.085.400,00	-	Penambahan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penataan Arsip dan Belanja Rak Arsip

				14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Tidak ada perubahan
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Tidak ada perubahan
				16	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	99.922.200,00	99.922.200,00	-	Tidak ada perubahan
				17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	146.353.700,00	156.343.700,00	9.990.000,00	Penambahan Belanja Alat Pendingin dan Peralatan Komputer untuk mendukung kinerja SKPD
				18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	-	Tidak ada perubahan
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	350.000.000,00	270.000.000,00	80.000.000,00	Penyesuaian Belanja Listrik

				20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	499.921.716,00	337.246.917,00	- 162.674.799,00	Penyesuaian Belanja Jasa Tenaga Administrasi yang telah diangkat menjadi Pegawai PPPK dan mengubah Tenaga Kebersihan menjadi tenaga Outsourcing sekaligus penyesuaian belanja Asuransinya
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000,00	34.986.400,00	14.986.400,00	Penambahan Belanja BBM Mobil Jabatan
				22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	64.608.000,00	80.130.000,00	15.522.000,00	Penambahan Belanja BBM Mobil Operasional Lapangan
				23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	24.925.900,00	24.925.900,00	-	Tidak ada perubahan
				24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Penambahan Belanja Pemeliharaan Gedung kantor

2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	43.933.562,00	40.997.949,39	- 2.935.612,61	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				26	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	43.678.858,00	36.509.639,00	- 7.169.219,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	16.301.779,00	14.403.422,00	- 1.898.357,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	40 Dokumen	16.320.405,00	16.301.862,00	- 18.543,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	4.136.885,00	709.914,00	- 3.426.971,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	4.235.743,00	782.688,00	- 3.453.055,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				31	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PERDA ttg APBD dan PERKADA ttg Penjabaran APBD	2 Dokumen	179.730.163,00	172.322.702,35	- 7.407.460,65	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025

				32	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA ttg Perubahan APBD dan PERKADA ttg Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	158.964.406,00	173.935.390,80	14.970.984,80	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025 dan terdapat penambahan Perjalanan Dinas Dlm provinsi dalam rangka mengawal Pembahasan APBD dengan Banggar DPRD	
				33	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	31.156.512,00	25.145.111,00	6.011.401,00	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
		9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	34	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84 Dokumen	14.797.621,00	13.670.768,80	1.126.852,20	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				35	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	56.308.402,00	44.978.904,40	11.329.497,60	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				36	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	2 Dokumen	9.999.829,00	9.999.829,00	-	-	Tidak ada perubahan

					Kegiatan						
				37	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	19.928.218,00	15.776.218,00	4.152.000,00	- Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				38	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemkab	120 Orang	54.993.251,00	54.993.251,00	-	Tidak ada perubahan
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	39	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 Laporan	119.997.161,94	101.268.220,71	18.728.941,23	- Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025

				40	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3 Dokumen	85.424.235,73	83.714.620,00	- 1.709.615,73	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				41	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8 Laporan	192.679.691,00	172.007.545,00	- 20.672.146,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				42	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	294.798.856,28	280.907.168,60	- 13.891.687,68	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025

				43	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan PERDA ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan PERKADA ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota	6 Dokumen	189.999.606,00	178.482.720,00	- 11.516.886,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen	34.996.370,25	28.383.303,22	- 6.613.067,03	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				45	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan & Pertanggungjawaban Pemkab/Kota	120 Orang	67.254.723,00	52.649.444,00	- 14.605.279,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
		11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	46	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	290.376.263.769,00	299.854.392.561,00	9.478.128.792,00	Penyesuaian Belanja Keuangan Khusus untuk 38 Desa yang berkarakter di Kabupaten Tanah Laut

				47	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	109.676.090.274,95	23.633.286.689,39	86.042.803.585,56	-	Penyesuaian belanja BTT serta dalam rangka mendukung Program Unggulan Bupati Tanah Laut
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	48	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	229.995.307,90	210.164.486,90	19.830.821,00	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				49	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar BMD & Standar Kebutuhan BMD	41 Dokumen	5.506.883.190,13	5.209.668.863,48	297.214.326,65	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				50	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan BMD	1 Dokumen	44.999.462,00	31.919.222,00	13.080.240,00	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				51	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	16 Laporan	614.999.051,74	629.226.298,60	14.227.246,86	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025 dan penambahan Belanja Perjadi dalam rangka Workshop TOT Aplikasi E BMD
				52	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMD	1 Laporan	52.589.600,10	25.939.680,10	26.649.920,00	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				53	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	4 Laporan	902.110.024,22	781.886.777,02	120.223.247,20	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				54	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD & Hasil Koordinasi Penilaian BMD	5 Laporan	198.790.991,24	154.782.746,30	44.008.244,94	-	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025

				55	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan & Pengelolaan Pengendalian BMD	1 Laporan	1.090.699.335,00	5.112.434.550,00	4.021.735.215,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025 serta penambahan Belanja Modal Mobil Dinas Jabatan untuk SKPD di Kabupaten Tanah Laut
				56	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan & Penghapusan BMD	8 Dokumen	81.499.595,74	70.852.959,77	10.646.635,97	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				57	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD yang disusun	8 Laporan	24.999.651,00	20.089.374,00	4.910.277,00	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025
				58	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan BMD Pemkab	160 Orang	62.999.269,29	118.752.974,16	55.753.704,87	Efisiensi Belanja sesuai Inbup No : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025 dan penambahan Belanja Kegiatan Bimtek Aplikasi E BMD yang akan dilaksanakan di Dalam Provinsi dengan mengundang Narasumber dari Pusat
JUMLAH	3		12		58			Rp 422.261.894.908,51	Rp 350.568.692.685,47	-Rp 71.693.202.223,04	

Berdasarkan hasil rekapitulasi Rencana Kerja Perubahan BPKAD Tahun 2025 diatas, terjadi penyesuaian antara pagu semula sebesar Rp422.261.894.908,51 dengan pagu perubahan sebesar Rp350.568.692.685,47 pada sejumlah program dan kegiatan. Secara keseluruhan, pagu perubahan lebih rendah dibandingkan pagu semula, sehingga menghasilkan penghematan atau efisiensi anggaran sebesar - Rp71.693.202.223,04. Pelaksanaan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 900.1.12.2/349/BPKAD/2025 dan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 900.1.12.2/610/BPKAD/2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi tersebut menekankan perlunya pengendalian, rasionalisasi, dan efisiensi belanja dengan prinsip hemat namun tetap menjamin pencapaian target kinerja. Efisiensi dilakukan melalui penyisiran kebutuhan riil belanja, rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan, serta pengendalian belanja operasional. Penghematan yang dihasilkan tidak mengurangi target keluaran (output) yang telah direncanakan, sehingga efektivitas program tetap terjaga.

Dengan adanya kebijakan ini, BPKAD Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang hemat, efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, sejalan dengan kebijakan nasional dan arahan pemerintah daerah dalam memperkuat disiplin fiskal serta mendukung tercapainya tata kelola keuangan yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2029 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dengan adanya RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 10 Juni 2025

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

(Pembina Utama Muda / IV.c)

NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD

NOMOR : 050.13 / 6 / BPKAD /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT**

KEPALA BPKAD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.
2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goal's) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/6/BPKAD/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si